

Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013

Oleh:

Figih Fez Sugeha¹
Herman Karamoy²
Rudy J. Pusung³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email : ¹figih@sugeha@yahoo.com

ABSTRACT

Regional Government in managing the budget income and expenditure (APBD) should be realized well and properly. The performance was the image of achievement of activity in realize the objective, purpose, vision, and mission on organization. The purpose of this research is to know the performance of realized in Budget income and expenditure of the city government of Tomohon. Based on this research that had been did on Department of Revenue Finance Managing and Regional Asset (DPPKAD) City of Tomohon indicate that it performance of Income from City Government of Tomohon is good enough and can be seen from the realization of budget for the year 2011 was not accordance to the targeted, but in the next year is according on target and keep going well. But the Regional Budget Income must be enhanced by the City Government of Tomohon. Whilst the performance of expenditure was quite well because the expenditure quite relatively small and occurred saving the expenditure so that SILPA surplus can be obtain.

Keywords: *Progress of work, Region budget expenses*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola,serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan di suatu negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya meningkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu pendidikan, kesehatan maupun keimanan.

Pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi membawa perubahan bagi pemerintahan Indonesia. Dengan adanya perubahan tersebut maka dituntut untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Halim (2007:1) menyatakan otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemeritahan daerah, sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pemerintah daerah ditetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan atas tugas pembantuan.Pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar

berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan kinerja pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama isi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007:230). Dengan analisis ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

Pada tahun anggaran 2011 BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) untuk tahun anggaran 2011 kepada Pemerintah Kota Tomohon, BPK memberikan pernyataan untuk tidak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Dan pada tahun anggaran 2012, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) kepada Pemerintah Kota Tomohon. Jumlah dana perimbangan pada anggaran Pemerintah Kota Tomohon masih mendominasi pendapatan daerah. Jumlah dana perimbangan yang mendominasi pendapatan daerah tersebut menunjukkan bagaimana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern atau dengan kata lain berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Untuk menganalisis kinerja keuangan perlu juga untuk menganalisis selisih anggaran, tingkat desentralisasi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Tomohon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah kota Tomohon selama periode 2011-2013.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta (Bastian, 2006: 6). Darise (2008: 28) mengemukakan definisi Akuntansi sektor Publik adalah proses menghasilkan informasi bagi pihak dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan kepada pihak-pihak eksternal pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang memerlukan.

Dalam pelaksanaan APBD pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan ramalan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyusunan APBD dengan

perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, terjadi jika :

1. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Mahsun (2006: 25) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi individu maupun kelompok. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau individu kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Mahsun (2006: 152) menyatakan bahwa analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolapendapatan (Marizka, 2010: 40). Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Mahsun (2006: 191) menjelaskan bahwa rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinya dan presentase tingkat pencapaiannya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasinya dengan rancangan penerimaan pajak daerah.

Mahsun (2006: 152) menyatakan bahwa analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau presentasenya.

Marizka (2010: 42) menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Baik itu untuk belanja langsung maupun untuk belanja tidak langsung.

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Efisiensi berhubungan dengan metode operasi (Marizka, 2006: 43). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dengan total belanja.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*), Halim (2007 :128) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Penelitian Terdahulu

1. Daling (2013) dengan judul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja realisasi APBD Pemerintah Kab. Minahasa tenggara selama periode 2009-2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pendapatan pada pemerintah kab. Minahasa tenggara belum efektif sedangkan untuk kinerja belanja telah efektif.
2. Paat (2013) dengan judul Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan membandingkan kinerja pengelolaan APBD antara Kota Tomohon dan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deksriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Tomohon lebih baik dari Pemerintah Kota Manado dalam mengelola APBD pada tahun anggaran 2010-2011.

3.METODE PENELITIAN

3.1 Data

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, menurut Sugiyono (2013: 8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil peneitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon.Sedangkan waktu penelitian yaitu pada bulan Maret-April 2015.

Prosedur penelitian ini dilakukan kajian awal dengan menggunakan studi literatur, baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet.Kemudian melakukan pengidentifikasian masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian kemudian perancangan dan persiapan survey yang telah ditentukan sampai dengan saran dan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Analisis Kinerja Pendapatan
 - a) Analisis Varians Anggaran Pendapatan : Selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan.
 - b) Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

- c) Analisis Rasio Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Kinerja Belanja

- a) Analisis Varians Anggaran Belanja : Selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.
- b) Analisis Keserasian Belanja : Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja.

$$\text{Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

- c) Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

- d) Rasio Pertumbuhan

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } (t - 1)}{\text{PAD Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } (t - 1)}{\text{Pendapatan Thn } (t - 1)} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t - 1)}{\text{Belanja Tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

3.3 Metode Analisis

Sugiyono (2011:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dimana sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

4.HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Tomohon sejak dahulu telah dituliskan dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya terdapat dalam karya etnografis Pendeta N. Graafland yang ketika pada tanggal 14 Januari 1864 di atas kapal Queen Elisabeth, ia menuliskan tentang suatu negeri yang bernama Tomohon yang dikunjunginya pada sekitar tahun 1850. Menurut beberapa sumber, Tomohon asal kata (Tou mu'ung) dalam bahasa tombulu. Dikatakan bahwa Tomohon adalah salah satu daerah yang termasuk dalam etnis tombuu, ialah salah satu dari delapan etnis asli minahasa.

Kota Tomohon berada pada 1°15' Lintang Utara dan 124°50' Bujur Timur. Luas Kota Tomohon berdasarkan keputusan UU RI Nomor 10 Tahun 2003 sekitar 11.420 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 87.719 jiwa. Kota Tomohon terletak di ketinggian kira-kira 700-800 meter dari permukaan laut (dpl), diapit oleh 2 gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon

(1.689 m) dan Gunung Mahawu (1.311 m). suhu di Kota Tomohon pada waktu siang mampu mencapai 30 derajat Celcius dan 23-24 derajat Celcius pada malam hari.

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DPPKAD/DPPKBMD Kota Tomohon sesuai dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tomohon Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tomohon.

1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Analisis Varians Pendapatan Kota Tomohon 2011-2013

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Selisih dan Anggaran Realisasi Pendapatan
2011	387.575.703.851	383.044.240.149	-4.531.463.702
2012	384.985.328.700	388.641.585.596	3.656.256.896
2013	458.477.532.416	461.311.984.055	2.834.451.639

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelolah pendapatan. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggara desentralisasi.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Tomohon 2011-2013

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio DDF (%)	Keterangan
2011	8.095.029.622	383.044.240.149	2,11	Sangat Kurang
2012	11.241.635.125	388.641.585.596	2,90	Sangat Kurang
2013	13.945.339.275	461.311.984.055	3,02	Sangat Kurang

3. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Efektifitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Tomohon 2011-2013

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas Pajak Daerah (%)
2011	3.872.372.100	4.031.730.282	104,11
2012	3.524.759.217	3.774.798.077	107,09
2013	4.685.975.000	5.458.559.604	116,49

4. Analisis Varians Belanja

Analisis varians anggaran belanja merupakan selisih antara realisasi dengan anggaran. Perhitungan berikut menunjukkan varians anggaran belanja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Varians Belanja Kota Tomohon 2011-2013

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih dan Anggaran Realisasi Belanja (Rp)
2011	378.975.703.851	357.814.241.200	21.161.462.651
2012	403.161.500.071	374.925.563.075	28.235.936.996
2013	487.182.091.789	451.182.738.551	35.779.353.238

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Baik itu untuk belanja langsung maupun untuk belanja tidak langsung.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Kota Tomohon 2011-2013

Tahun	Belanja (Operasi) (%)	Langsung Belanja (%)	Tidak Langsung (Modal)
2011	78	21,58	
2012	79	19,72	
2013	72,58	27,42	

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Efisiensi berhubungan dengan metode operasi.

Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Kota Tomohon 2011-2013

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)
2011	378.975.703.851	357.814.241.200	94,42
2012	403.161.500.071	374.925.563.075	93
2013	487.182.091.789	451.402.738.551	92,66

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD, Pendapatan, Belanja Kota Tomohon 2011-2013

Tahun	Total (Rp)	PAD (%)	PAD (%)	Total Pendapatan (Rp)	PD (%)	Total Belanja (Rp)	Belanja (%)
2011	8.095.029.622	-	-	383.044.240.129	-	357.814.241.200	-
2012	11.241.635.125	38,87	38,87	388.641.585.596	1,46	374.925.563.075	4,78
2013	13.945.339.275	24,05	24,05	461.311.984.055	18,70	451.402.738.551	20,40

4.2 Pembahasan

Analisis Varians Pendapatan

Dari segi pendapatan tahun 2011, Pemerintah Kota Tomohon tidak sesuai yang ditargetkan, karena dalam tahun 2011 pemerintah kurang berhasil merealisasikan PAD. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 sudah sesuai target. Tetapi jumlah dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah, yang artinya Pemerintah Kota Tomohon masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi

Dari segi derajat desentralisasi, Pemerintah Kota Tomohon berada dalam kategori sangat kurang, karena berada pada skala dibawah 10,00%. Hal ini menunjukkan pemerintah belum mengoptimalkan PAD dan belum meningkatkan kemampuan dalam kemandirian.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Dari segi efektivitas pajak daerah, Pemerintah Kota Tomohon sudah sangat baik, karena mampu merealisasikan lebih dari yang ditargetkan dan meningkatkan pajak daerah dari tahun ke tahun.

Analisis Varians Belanja

Dari segi belanja, Pemerintah Kota Tomohon merealisasikan belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. Belanja operasi menjadi pengeluaran paling besar, yang didalamnya terdapat belanja pegawai dan belanja barang.

Rasio Kecerassian Belanja

Dari segi keserasian belanja, Pemerintah Kota Tomohon terlihat lebih memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi (langsung) dari pada belanja modal (tidak langsung).

Rasio Efisiensi Belanja

Dari segi efisiensi belanja, Pemerintah Kota Tomohon melakukan penghematan belanja dengan baik pada tahun 2011 sampai dengan 2012 dan mendapatkan SILPA (sisal lebih perhitungan anggaran).

Rasio Pertumbuhan

Dari segi pertumbuhan, Pemerintah Kota Tomohon dalam tahun 2011 sampai dengan 2013 dapat dikatakan baik, karena mengalami pertumbuhan positif atau peningkatan dari segi Pendapatan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan Belanja.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Kinerja pendapatan dari Pemerintah Kota Tomohon cukup baik, yang dapat dilihat dari realisasi pendapatan tahun 2012 dan 2013 sudah melebihi target, kecuali pendapatan pada tahun 2011 yang tidak memenuhi target. Tetapi terjadi peningkatan pendapatan selama 3 tahun, jadi dapat dikatakan kinerja Pemerintah kota Tomohon cukup baik. Kinerja belanja dari Pemerintah Kota Tomohon sudah sangat baik dilihat dari belanja yang relatif kecil dan ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tomohon sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan kota dan lain sebagainya.

Adapun Saran yang dapat diberikan adalah, Pemerintah Kota Tomohon harus terus meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini akan sangat bermanfaat untuk pembangunan kota serta menjadi kota yang mandiri dan tidak sangat bergantung pada dana transfer. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mempertahankan efisiensi belanja yang telah dilakukan untun periode tahun anggaran 2011-2013. Dengan mendapatkan SILPA surplus (sisa lebih perhitungan anggaran) pada periode 3 tahun membuat Pemerintah Kota Tomohon diharapkan dapat melanjutkan ke tahun-tahun selanjutnya, dan SILPA surplus bisa dipakai untuk menunjang program-program lainnya dari Pemerintah Kota Tomohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita.(2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta.
- Daling, Marchelino. (2013). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Darise, Nurlan. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT. Indeks. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Mohammad Iqbal,. (2012). Pengelolaan Keuangan Negara. Bulak Sumur. NPP STIM YKPN
- Selly Paat. (2013).P erbandingan Kinerja Pengelolaan APBD antara Pemerintah Kota Tomohon dengan Pemerintah Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. ANDI. Yogyakarta.
- Marizka. (2010). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2013. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta. Bandung